

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP  
AGRESIVITAS PAJAK (STUDI PADA PERUSAHAAN  
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR  
DI BURSA EFEK INDONESIA)**

**SKRIPSI**

OLEH :

SISRA FEBRYANTI  
NIM : 14622117



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG

2019

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP  
AGRESIVITAS PAJAK (STUDI PADA PERUSAHAAN  
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR  
DI BURSA EFEK INDONESIA)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH :

SISRA FEBRYANTI  
NIM : 14622117

PROGRAM STUDI SI AKUNTANSI



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG

2019

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP  
AGRESIVITAS PAJAK (STUDI PADA PERUSAHAAN  
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR  
DI BURSA EFEK INDONESIA)**

Diajukan Kepada:

Panitia Komisi Ujian  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang

Oleh :

SISRA FEBRYANTI  
NIM : 14622117

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Bambang Sambodo, SE.,M.AK  
NIDN. 8833900016 / Asisten Ahli

Hendy Satria, SE.,M.AK  
NIDN. 1023067001 / Lektor

Mengetahui  
Ketua Program Studi,

Sri Kurnia, SE. Ak. M.Si. CA  
NIDN. 1020037101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP  
AGRESIVITAS PAJAK (STUDI PADA PERUSAHAAN  
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR  
DI BURSA EFEK INDONESIA )**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

SISRA FEBRYANTI  
NIM : 14622117

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Komisi Ujian  
Pada Tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua

Sekretaris

Bambang Sambodo, SE. M.Ak.  
NIDN. 8833900016 / Asisten Ahli

Sri Kurnia, SE. Ak., M. SI. CA  
NIDN. 1020037101 / Lektor

Anggota

Eka Kurnia Saputra, ST. M  
NIDK. 1011088902 / Asisten Ahli

Tanjungpinang, 14 Agustus 2019  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang  
Ketua,

Charly Marlinda, SE. M.Ak. Ak. CA  
NIDN. 1029127801 / Lektor

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sisra Febryanti

NIM : 14622117

Tahun Angkatan : 2014

Indeks Prestasi Kumulatif : 3,24

Program Studi / Jenjang : Akuntansi / Strata 1

Judul Skripsi : Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Agresivitas (studi Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh isi dari skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kijang, 01 Agustus 2019

Mahasiswa

Sisra Febryanti  
NIM. 14622117

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Puji syukur skripsi ini saya persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, dan kemampuan kepada saya dalam menuntut ilmu sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.*

*Ucapan terimakasih kepada Bapak dan Ibu saya yaitu Siswanto dan Siti Rahayu yang telah membesarkan saya dan yang selalu memberikan dukungan dan nasihatnya sehingga saya bisa menempuh jalur pendidikan sampai ke perguruan tinggi.*

## HALAMAN MOTTO

*“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”*

*( QS. Al-Insyirah 6-8)*

*“ Tidak Ada Rahasia Tertentu Untuk Sukses, Hanya Hasil Dari Persiapan, Kerja Keras, Dan Belajar Dari Kesalahan “*

*( Gen Collin Powell )*

*“ The Are No Secrets To Succes It Is The Result Of Preperation, Hard Work, And Learning From Failute “*

*{ Cen Collin Powell )*

## HALAMAN MOTTO

*“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”*

*( QS. Al-Insyirah 6-8)*

*“ Tidak Ada Rahasia Tertentu Untuk Sukses, Hanya Hasil Dari Persiapan, Kerja Keras, Dan Belajar Dari Kesalahan “*

*( Gen Collin Powell )*

*“ The Are No Secrets To Succes It Is The Result Of Preperation, Hard Work, And Learning From Failute “*

*{ Cen Collin Powell )*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Skripsi ini berjudul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018”**.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak sedikit hambatan yang peneliti hadapi, namun peneliti menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan skripsi ini berkat bantuan, dorongan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu:

1. Ibu Charly Marlinda, SE. M.Ak. Ak. CA, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang dan selaku Dosen Penasehat Akademis (PA) peneliti selama menuntut ilmu di STIE Pembangunan Tanjungpinang
2. Ibu Ranti Utami, SE. M.Si. Ak. CA, selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, SE. Ak. M.Si. CA, selaku Wakil Ketua II dan Selaku Ketua Program Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Hendy Satria, SE. M. AK selaku Sekretaris Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, dan selaku pembimbing II dalam skripsi ini.
5. Bapak Bambang Sambodo, SE. M. AK, selaku Dosen Pembimbing I dalam skripsi ini.
6. Seluruh jajaran Staf BAAK dan Staf BAUK Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

7. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti semasa perkuliahan.
8. Teman spesialku Wahyu Sampurna yang telah mendukung, memotivasi dan membantu saya dalam pembuatan skripsi ini dari awal hingga selesai.
9. Sahabatku Adelia dan Hery Suantosa yang telah berjuang bersama-sama selama duduk dalam bangku perkuliahan dan memberikan motivasi dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2014 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang telah berjuang bersama-sama selama duduk dalam bangku perkuliahan.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Kijang, 01 Agustus 2019

Sisra Febryanti  
NIM. 14622117

## DAFTAR ISI

	Halama
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTO	
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI. ....	x
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GRAFIK .....	xv
ABSTRAK ... ..	xvi
ABSTRACT . ....	xvii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Batasan Masalah .....	8
1.5. Kegunaan Penelitian .....	8
1.5.1. Kegunaan Ilmiah .....	9
1.5.2. Kegunaan Praktis .....	9
1.6. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1. Tinjauan Teori .....	12
2.1.1. akuntansi .....	12
2.1.2.1. Pengertian Akuntansi .....	12

2.1.2. Laporan Keuangan.....	13
2.1.3. Pajak .....	15
2.3.1.1. Pengertian Pajak .....	15
2.3.1.2. Fungsi Pajak.....	15
2.3.1.3. Sistem Pemungutan Pajak .....	16
2.1.3. <i>Good Corporate Governance</i> .....	20
2.1.3.1. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i> .....	20
2.1.3.2. Prinsip Dasar <i>Good Corporate Governance</i> .....	20
1. Dewan Komisaris.....	22
2. Komisaris Independen.....	24
3. Komite Audit .....	25
4. Dewan Direksi.....	26
2.1.4. Agresivitas pajak.....	27
2.1.5. Pengaruh Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat .....	30
2.1.5.1. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Agresivitas pajak .....	30
2.1.5.2. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak .....	31
2.1.5.3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak.....	32
2.1.5.4. Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Agresivitas pajak.....	33
2.2. Kerangka Pemikiran .....	33
2.3. Hipotesis.....	35
2.4. Penelitian Terdahulu .....	36
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	42
3.1. Jenis Penelitian .....	42
3.2. Jenis Data .....	42

3.3. Metode Pengumpulan Data .....	43
3.3.1. Dokumentasi .....	43
3.3.2. Studi Pustaka .....	43
3.4. Populasi dan Sampel .....	44
3.4.1. Populasi .....	44
3.4.2. Sampel .....	47
3.5. Definisi Operasional Variabel .....	49
3.6. Teknik Pengolahan Data .....	51
3.7. Teknik Analisis Data .....	53
3.7.1. Uji Normalitas .....	53
3.7.2. Uji Multikolenieritas .....	54
3.7.3. Uji Autokorelasi .....	55
3.7.4. Uji Heteroskedastisitas.....	56
3.7.5. Analisis Statistik.....	57
3.7.5.1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	57
3.7.5.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	57
3.7.5.3. Analisis Regresi Linear Berganda.....	58
3.7.5.4. Uji Hipotesis .....	59
<b>BAB IV. PEMBAHASAN.....</b>	<b>60</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	60
4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan .....	60
4.1.1.1. Objek Penelitian.....	60
4.1.1.2. Sejarah Singkat Perusahaan Manufaktur .....	60
4.1.2. Data Penelitian .....	64
4.1.3. Hasil Olah data.....	64
4.1.3. Hasil Analisa Data .....	82
4.1.3.1. Uji Asumsi Klasik .....	82
1. Uji Normalitas .....	82
2. Uji Multikolenieritas .....	84
3. Uji Autokorelasi .....	85
4. Uji Heteroskedastisitas .....	86

4.1.3.2. Analisis Regresi Linear Berganda .....	87
4.1.3.3. Uji Hipotesis .....	90
1. Uji t (Uji Parsial).....	90
2. Uji F (Uji Simultan).....	92
4.1.3.4. Uji Determinasi.....	93
4.1.3.5. Pembahasan Hasil Penelitian .....	95
1. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Agresivitas pajak.....	95
2. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak .....	96
3. Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Agresivitas Pajak .....	96
4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak .....	97
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>98</b>
5.1. Kesimpulan .....	98
5.2. Saran .....	99
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITE	

## DAFTAR TABEL

HALAMAN JUDUL	Halaman
Tabel 1.1. Sampel PT. Semen Indonesia Persero Tbk .....	4
Tabel 1.2. Sampel PT. Indocement Tunggal Perkasa Tbk .....	5
Tabel 3.1 Populasi Perusahaan .....	44
Tabel 3.2. Proses Pemilihan Sampel .....	48
Table 3.3. Sampel Perusahaan .....	49
Tabel 4.1. Perusahaan Mnfaktur yang dijadikan sampel Periode 2013 – 2018 .....	63
Tabel 4.2 Jumlah Dewan Komisaris Perusahaan Manufaktur Tahun 2013-2018 .....	65
Tabel 4.3 Jumlah Komisaris Independen Perusahaan Manufaktur Tahun 2013-2018 .....	68
Tabel 4.4 Jumlah Dewan Direksi Perusahaan Manufaktur Tahun 2013-2018 .....	72
Tabel 4.5 Jumlah Komite Audit Perusahaan Manufaktur Tahun 2013-2018 .....	75
Tabel 4.6 Jumlah Pajak Agresif Perusahaan Manufaktur Tahun 2013-2018 .....	78
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas .....	83
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas .....	84
Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi .....	86
Tabel 4.10 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .....	88
Tabel 4.11 Hasil Tabel Uji t ( Uji Parsial) .....	91
Tabel 4.12 Hasil Uji F (Uji Simultan).....	93
Table 4.13 Hasil Uji Determinasi.....	94

## DAFTAR GRAFIK

HALAMAN JUDUL	Halaman
Grafik 4.1 Dewan Komisaris .....	67
Grafik 4.2 Komisaris Independen .....	71
Grafik 4.3 Dewan direksi .....	74
Grafik 4.4 Komite Audit .....	77
Grafik 4.5 Agresifitas Pajak .....	81
Grafik 4.6 Uji Normalitas .....	82
Grafik 4.7 Uji Heteroksidastisitas .....	87

## ABSTRAK

### PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)

Kata kunci : Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, Dewan Direksi dan Agresivitas Pajak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada hubungan pengaruh antara *Good Corporate Governance* terhadap Agresivitas Pajak studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI).

Objek penelitian yang diambil berjumlah 13 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan 6 tahun sehingga berjumlah 78 sampel observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Komite Audit memiliki pengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Dan Dewan Direksi memiliki pengaruh signifikan Terhadap agresivitas Pajak.

Pajak merupakan bentuk pengabdian dan peranan untuk peningkatan pembangunan secara nasional. perusahaan didirikan tentunya memiliki tujuan utama untuk mendapatkan laba yang banyak. Tujuan ini bisa diwujudkan dengan suatu penerapan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). penerapan ini harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan terus berkembang namun tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan, salah satunya penghindaran pajak secara agresif.

Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan, Agustus 2019

(xvii + 99 halaman + 17 tabel + 7 grafik + 3 lampiran)

Referensi : 49 (30 buku + 17 jurnal)

Dosen Pembimbing 1 : Bambang Sambodo, SE.M.AK

Dosen Pembimbing 2 : Hendy Satria, SE.M.AK

## ABSTRACT

### PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA)

*Keywords: Board of Commissioners, Independent Commissioners, Audit Committee, Board of Directors and Tax Aggressiveness*

*This study aims to examine whether there is a relationship between the influence of Good Corporate Governance on Tax Aggressiveness studies in manufacturing companies listed on the Indonesian stock exchange (IDX).*

*The object of research taken was 13 samples of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange with a observation period of 6 years so that there were 78 observation samples. The analytical method used in this study is multiple linear regression analysis.*

*The results of the study showed that the board of commissioners did not have a significant effect on tax aggressiveness. The Independent Commissioner has no significant influence on Tax Aggressiveness. The Audit Committee has a significant influence on Tax Aggressiveness. And the Board of Directors has a significant influence on tax aggressiveness.*

*tax is a form of service and role to increase national development. established companies certainly have the main goal to get a lot of profits. This goal can be realized by implementing Good Corporate Governance. this application must be carried out by the company so that the company continues to grow but does not violate the established rules, one of which is aggressive tax avoidance.*

Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan, Agustus 2019

(xvii + 99 halaman + 17 tabel + 7 grafik + 3 lampiran)

Referensi : 49 (30 buku + 17 jurnal)

Dosen Pembimbing 1 : Bambang Sambodo, SE.M.AK

Dosen Pembimbing 2 : Hendy Satria, SE.M.AK

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan unsur penting bagi suatu negara. Bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan kepada negara, pajak juga merupakan sumber penerimaan negara yang sangat strategis dan juga sangat diandalkan. Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Bagi wajib pajak, pajak merupakan bentuk pengabdian dan peran dalam berkontribusi untuk peningkatan pembangunan secara nasional. Fenomena ini mengenai pemungutan pajak menjadi fenomena sangat penting yang harus menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi kecurangan.

Reformasi pajak sering dilakukan oleh pemerintah guna memperbaiki dan meningkatkan sistem perpajakan di Indonesia. Misalkan saja, bagi para pelaku usaha yang dikatakan sebagai wajib pajak badan akan mendapatkan potongan tarif sebesar ketentuan yang telah berlaku di dalam PP No. 36 tahun 2017, pasal 4 ayat (1), potongan tarif yang dimaksud sebesar 25%. Potongan tersebut dapat digunakan sebagai motif dari pemerintah dalam mengefisienkan sistem perpajakan agar lebih netral, sederhana, dan memberikan kepastian hukum serta transparansi. Maka dari itu selain untuk meningkatkan pendapatan negara hal ini dirancang agar tidak melakukan perbuatan menghindari pajak secara agresif.

Dalam perkembangannya kementerian keuangan juga mengatakan bahwa salah satu penyebab rendahnya penerimaan pajak di Indonesia adalah dikarenakan rendahnya kepatuhan penyampaian pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Salah satu perbuatan yang dilakukan ialah Wajib Pajak badan tidak dapat membayar pajak karena pengurangan laba yang didapatkan untuk pembayaran pajaknya sangat tinggi sehingga keuntungan yang diperoleh semakin meningkat.

Namun pelaksanaan pemungutan pajak, tidak selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Suatu perusahaan didirikan tentunya memiliki maksud dan tujuan utama untuk mendapatkan laba sebanyak mungkin atau keuntungan. Tujuan perusahaan bisa diwujudkan dengan suatu pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). GCG yaitu sistem untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan yang membuat nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Dengan konsep dan penerapan GCG, pengelolaan perusahaan harus profesional dengan menciptakan nilai tambah dan menghindari kesalahan. Hal ini sejalan dengan esensi *Good corporate Governance* sendiri yaitu meningkatkan kinerja perusahaan. Struktur dalam *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan terdapat Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Auditor Independen, dan Manajemen Resiko,

*Good corporate governance* dalam suatu perusahaan bertujuan untuk menciptakan suatu tata kelola perusahaan yang baik, efektif dan efisien dimana dalam mekanisme *good corporate governance* telah diatur dengan penerapan-penerapan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan dapat terus

berkembang namun tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya adalah penghindaran pajak secara agresif. Perusahaan yang telah menerapkan *good corporate governance* diharapkan menghasilkan kinerja yang baik dan efisien karena *Good Corporate Governance* dapat memberikan perlindungan efektif dan efisien bagi para pemegang saham dan *stakeholder*. Oleh karena itu, secara implisit dapat dikatakan bahwa *good corporate governance* dan agresifitas pajak memiliki sebuah korelasi, karena perusahaan merupakan wajib pajak sehingga kenyataannya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, tetapi di sisi lain agresifitas pajak juga tergantung pada dinamika dari *good corporate governance* dalam suatu perusahaan. karakteristik *corporate governance* seperti kominsaris independen, dewan kominsaris, komite audit dan dewan direksi pada perusahaan yang tercatat di BEI merupakan salah satu faktor penghindaran pajak karena hubungan yang positif.

Berbagai variasi masalah tergambar pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2018. Fenomena mengenai *good corporate governance* mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan yang menyebabkan nilai mata uang di Indonesia menurun.

Menurut (Sadasiha & Hadiprajitno, 2014), hasil survey ACGA (*Asian Corporate Governance Association*) pada 11 negara terhadap pelaku bisnis asing di Asia tahun 2012 menempatkan Indonesia sebagai Negara terburuk di bidang

*corporate governance*. Itu membuat praktik *corporate governance* yang masih kurang baik pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, merusak citra dan reputasi perusahaan. bukti empiris baru-baru ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak lebih merasuk dalam tata kelola perusahaan yang lemah. James (Fahriani & Priyadi, 2016).

Selain itu jika melihat salah satu contoh laporan keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia, khususnya di sektor manufaktur dapat ditemukan beberapa perusahaan yang memiliki data keuangan seperti meningkatnya secara signifikan laba sebelum pajak pada perusahaan tersebut tetapi pada beban pajaknya hanya memiliki peningkatan yang tidak terlalu signifikan.

Tabel 1.1

PT. Semen Indonesia (Persero). Tbk

Keterangan	Beban Pajak Penghasilan	Laba Sebelum Pajak Penghasilan	DK	KI	KA	DD
2013	1.360.814.162	6.287.454.009	4	2	7	4
2014	1.566.101.213	6.920.399.734	3	3	3	7
2015	1.509.616.000	7.077.276.000	5	2	4	6
2016	1.325.482.000	5.850.923.000	5	2	4	3
2017	549.585.000	5.084.622.000	5	2	4	7
2018	703.520.449	2.746.546.363	5	2	4	7

Sumber : BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).)

Pada tahun 2016 laba sebelum pajak perusahaan sebesar Rp.5.850.923.000 dan beban pajak perusahaan sebesar Rp. 1.325.482.000, lalu pada tahun 2017 laba sebelum pajak perusahaan mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan, lalu beban pajak penghasilan perusahaan mengalami penurunan

yang signifikan menjadi sebesar Rp. 549.585.000. Lalu pada tahun 2018 laba sebelum pajak perusahaan mengalami penurunan sebesar Rp. 2.746.546.363, dan beban pajak perusahaan sebesar Rp. 703.520.449. . Ini bisa menunjukkan bahwa kemungkinan perusahaan tersebut melakukan praktik pajak agresiv. semakin banyak Dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan dewan direksi pada perusahaan tersebut. Maka semakin besar perusahaan tersebut melakukan praktik pajak agresif. Hal ini bisa menunjukkan bahwa kemungkinan perusahaan tersebut melakukan praktik pajak agresiv.

Tabel 1.2

PT. Indocement Tunggul Perkasa

Keterangan	Beban Pajak Penghasilan	Laba Sebelum Pajak Penghasilan	DD	KI	KA	DD
2013	1.476.162.000	6.239.550.000	4	2	3	8
2014	1.582.860,000	6.595.154.000	4	3	3	9
2015	1.521.220.000	6.814.636.000	4	3	3	9
2016	1.287.915.000	5.644.576.000	4	3	3	9
2017	275.313.000	4.145.632.000	5	2	3	9
2018	427.456.000	2.287.274.000	5	2	3	9

Sumber : BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).)

Pada tahun 2013 laba sebelum pajak perusahaan sebesar Rp.6.239.550.000, dan beban pajak perusahaan sebesar Rp. 1.476.162.000, lalu pada tahun 2014 laba sebelum pajak perusahaan naik sebesar Rp. 6.595.154.000 dan beban pajak perusahaan sebesar Rp. 1.582.860,000. Lalu pada tahun 2015 laba sebelum pajak perusahaan naik menjadi Rp. 6.814.636.000 dan beban pajak perusahaan sebesar Rp. 1.521.220.000. Lalu pada tahun 2016 laba sebelum pajak

perusahaan turun menjadi sebesar Rp. 5.644.576.000 dan beban pajak perusahaan sebesar Rp. 1.287.915.000. lalu pada tahun 2017 laba sebelum pajak perusahaan turun tetapi tidak terlalu signifikan menjadi Rp. 4.145.632.000 dan beban pajak perusahaan turun dengan sangat signifikan dari tahun sebelumnya menjadi Rp 275.313.000. dan pada tahun 2018 laba sebelum pajak perusahaan turun sebesar Rp. 2.287.274.000 dan beban pajak perusahaan nya sebesar Rp. 427.456.000.

Ini bisa menunjukkan bahwa kemungkinan perusahaan tersebut melakukan praktik pajak agresif. semakin banyak Dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan dewan direksi yang ada pada perusahaan tersebut. Maka semakin besar perusahaan tersebut melakukan praktik pajak agresif. Hal ini bisa menunjukkan bahwa ada kemungkinan perusahaan tersebut telah melakukan praktik pajak agresif.

Perkembangan manufaktur di Indonesia berkembang makin pesat yang ditandai dengan banyaknya pembangunan kuliner makanan dan minuman yang ada . Selain perkembangan yang cukup pesat, bisnis makanan dan minuman juga merupakan usaha yang dipastikan akan berkembang pesat, mengingat makin besarnya angka pertumbuhan penduduk di Indonesia yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan makanan dan minuman yang akan digemari dan dicari oleh sebagian orang.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018 ?

2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018 ?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018 ?
3. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018 ?
4. Apakah dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan dewan direksi berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh dewan komisaris terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018.

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh komite audit terhadap agresifitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018.
5. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh dewan direksi terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018.
4. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan dewan direksi terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018.

#### **1.4 Pembatasan Masalah**

Agar penulisan tidak menyimpang dari perumusan masalah dan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga mempermudah dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.

1. Variabel- variabel yang diteliti antara lain *good corporate governance* (dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dewan direksi) dan agresivitas pajak.
2. Populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia.
1. Periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2013-2018.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Suatu penelitian yang dilakukan harus memiliki kegunaan, baik secara

teoritis maupun secara praktis. Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.5.1 Kegunaan Ilmiah**

#### **1. Bagi Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi materi bacaan dan sumbangan pemikiran bagi pembaca untuk memperluas pengetahuan tentang agresivitas pajak. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sumber bahan bacaan, referensi, dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan penelitian dalam bidang yang sama agar mejadi luas.

#### **2. Bagi Peneliti**

Penelitian ini tidak hanya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, tetapi juga menjadi bahan pembelajaran bagi peneliti dalam nenambah pengetahuan tentang penerapan dari teori-teori tentang agresivitas pajak.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar diBursa Efek Indonesia berkaitan dengan pengaruh *good corporate governance* terhadap agresivitas pajak.

#### **1. Bagi Perusahaan**

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berkaitan dengan pengaruh GCG terhadap agresivitas pajak agar perusahaan tersebut tidak melanggar aturan.

## 2. Bagi Investor

Sebagai sumber informasi tambahan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi sebelum melakukan investasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia agar perusahaan tersebut menjadi yang lebih baik.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab secara berurutan yang diuraikan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi peneliti saat ini, kerangka pemikiran, model penelitian, serta hipotesis penelitian.

#### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

menjelaskan tentang objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta teknik pengolahan dan analisis.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menguraikan, menganalisis serta mengevaluasi hasil penelitian tersebut.

**BAB V : PENUTUP**

berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian, keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Teori**

##### **2.1.1. Akuntansi**

###### **2.1.1.1. Pengertian Akuntansi**

Akuntansi sering disebut bahasa bisnis, di mana informasi bisnis dikomunikasikan kepada *stakeholders* melalui laporan akuntansi (Hery, 2014). Akuntansi juga dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*) terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan.

Akuntansi memegang peranan penting dalam entitas karena akuntansi adalah bahasa bisnis (*business language*). Akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Informasi akuntansi tersebut digunakan oleh para pemakai agar dapat membuat prediksi kinerja di masa mendatang (Martani, 2016).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan informasi keuangan. Akuntansi merupakan cabang ilmu yang bertujuan menghasilkan informasi tentang kinerja dan kondisi keuangan suatu entitas yang relevan bagi proses pengambilan keputusan para pemakai yang berkepentingan.

### **2.1.1.2. Laporan Keuangan**

Laporan keuangan berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan antara perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan (Hery, 2015). Dengan kata lain, Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut (Martani, 2016), tujuan laporan keuangan antara lain untuk:

1. Memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
3. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.
4. Menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu.

Laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur- unsur laporan keuangan yang akan ditujukan kepada pihak- pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan itu sendiri .(Fahmi, 2011).

Selanjutnya (Hery, 2015), tujuan laporan keuangan untuk organisasi pencari laba (*profit organization*) adalah:

1. Memberikan informasi yang berguna bagi investor, kreditur, dan pemakai lainnya dalam membuat keputusan secara rasional mengenai investasi, kredit, dan lainnya.
2. Memberikan informasi untuk membantu investor atau calon investor dan kreditur serta pemakai lainnya dalam menentukan jumlah, waktu, prospek penerimaan kas dari dividen atau bunga dan juga penerimaan dari penjualan, piutang, atau saham, dan pinjaman yang jatuh tempo.
3. Memberikan informasi tentang sumber daya (aset) perusahaan, klaim atas aset, dan pengaruh transaksi, peristiwa, dan keadaan lain terhadap aset dan kewajiban.
4. Memberikan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan selama satu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan mendapatkan dan membelanjakan kas, tentang pinjaman dan pengembaliannya, tentang transaksi yang memengaruhi modal, termasuk dividen dan pembayaran lainnya kepada pemilik, dan tentang faktor-faktor yang memengaruhi likuiditas dan solvabilitas perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan akan mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaan kepada pemilik atas penggunaan sumber daya (aset) yang telah dipercayakan kepada perusahaan tersebut.
7. Memberikan informasi yang berguna bagi manajer dan direksi dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan pemilik perusahaan.

## **2.1.2. Pajak**

### **2.1.2.1. Pengertian Pajak**

Pajak adalah iuran kepada negara ( yang dapat dipaksakan ) yang terutang oleh yang wajib membayarkan menurut peraturan- peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (waluyo, 2009). Sementara menurut (mardiasmo, 2011a) , Pajak adalah iuran wajib kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### **2.1.2.2. Fungsi Pajak**

Menurut (Suparmono, 2009), pajak adalah iuran tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas dan belanja Negara yang telah diselenggarakan.

Dari definisi tersebut, dapat diuraikan beberapa unsur pajak sebagai berikut:

1. Iuran dari pajak untuk negara. Sifat pemungutan pajak adalah negara baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, iuran yang dibayarkan berupa hutang, bukan barang.
2. Berdasarkan undang-undang. Sifat pemungutan pajak dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh serta aturan.
3. Tidak terdapat kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam

pembayaran pajak.

4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Menurut (Mardiasmo, 2011b), pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau pelaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi sosial.

### **2.1.2.3. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut (Waluyo, 2009), sistem pemungutan pajak di bagi menjadi 3 yaitu:

1. *Official Assesment System* adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assessment* adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System* adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

wajib pajak.

Menurut (Pandingan, 2014) secara umum, ada 3 sistem dalam pemenuhan wajib perpajakan, yaitu:

1. *Self assessment system* adalah system pemenuhan kewajiban perpajakan dalam WP melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan data dan informasi yang ada padanya serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. *Official assessment system* adalah system pemenuhan kewajiban perpajakan dimana WP dilakukan oleh pihak lain (pihak ketiga) karena adanya penetapan pajak dari otoritas perpajakan ( kantor pajak)
3. *Withholding assessment system* adalah system pemenuhan kewajiban perpajakan dimana pelaksanaan kewajiban perpajakan WP dilakukan oleh pihak lain (pihak ketiga) karena adanya transaksi antara WP dan pihak lain tersebut.

Kemudian (Resmi, 2014) ada beberapa pemungutan pajak yaitu :

1. *Official Assesment System*  
System pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparataur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak

banyak tergantung pada aparaturnya perpajakan ( peranan dominan ada pada aparaturnya perpajakan).

2. *Self Assessment System*

System pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi , serta menyadari arti pentingnya membayar pajak.

3. *Withholding System*

System pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pajak pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui saran perpajakan yang tersedia berhasil atau tidaknya pelaksanaan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga. (Mardiasmo, 2009) secara umum ada 3 sistem dalam pemenuhan pemungutan pajak yaitu *Official assessment system, self assessment system, dan withholding system*, berikut pengertiannya:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) yang menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri- ciri dari *official Assessment System* adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan bentuk besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. *Self assessment system*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang perusahaan tersebut.

Ciri-ciri dari *Self Assessment System* adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dalam pajak yang terutang.

3. *Withholding system*

Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri- ciri *withholding system* adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

### **2.1.3. Good Corporate Governance**

#### **2.1.3.1. Pengertian Good Corporate Governance**

“*Good corporate governance* “ merupakan suatu prinsip dasar pengelolaan perusahaan secara transparan, akuntabel, dan adil sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku umum (Amin Wijaja Tunggal, 2010). *Good corporate governance* sangat bervariasi dan cenderung dapat dikategorikan dalam dua kategori (Hanna dan Melinda Haryanto, 2016)

1. Yaitu, perilaku yang sebenarnya dari perusahaan, dalam hal langkah-langkah seperti kinerja, efisiensi, pertumbuhan, struktur keuangan, dan perlakuan terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya
2. Yaitu, aturan di mana perusahaan beroperasi-dengan aturan yang berasal dari sumber seperti sistem hukum, sistem peradilan, pasar keuangan.

#### **2.1.3.2. Prinsip Dasar Good Corporate Governance**

Menurut (Pandingan, 2014), rumusan bagi lembaga yang memberikan perhatian di bidang bisnis telah menetapkan prinsip *good corporate governance* yang secara umum terdapat 5 prinsip dasar yaitu :

1. Keterbukaan (*transparency*) yaitu adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam informasi mengenai perusahaan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu adanya kejelasan di organisasi yang

menyangkut fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan menjadi efektif serta efisien.

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu adanya kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan perusahaan yang harus profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu adanya perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stake holder* sesuai perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktik pelaksanaannya *good corporate governance* dikenal adanya 4 prinsip yaitu :

1. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
2. Akuntabilitas (*accountability*)
3. Keadilan (*Fairnes*)
4. Transparasi (*Transparacy*)

Mendukung bahwa penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang diterapkan perusahaan akan mampu mengurangi tindakan-tindakan yang tidak efektif atau melanggar aturan-aturan yang berlaku. Dengan

adanya prinsip prinsip *good corporate governance* seperti independensi, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan maka fungsi tata kelola dan pengawasan perusahaan menjadi lebih baik terstruktur dan transparan hingga dapat menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menentang ketentuan umum yang berlaku .(Hadika & Wirawan, 2018)

Menurut (Amin Wijaja Tunggal, 2010) Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan *good corporate governance* adalah:

1. Terciptanya sasaran yang telah ditetapkan
2. Aktiva perusahaan dijaga dengan baik
3. Perusahaan menjalankan praktik-praktik bisnis yang sehat.
4. Kegiatan-kegiatan perusahaan dilakukan secara transparan.

Menurut (Simanjuntak Payman. j, 2011) tujuan ditetapkannya *good corporate governance* adalah :

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
2. Melindungi hak dan kepentingan stekholder
3. Meningkatkan nilai saham dari perusahaan
4. Meningkatkan kerja serta hubungan para dewan dan manajemen.

#### **1. Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas, bertanggungjawab secara kolektif dalam melakukan pengawasan, dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan tugasnya. Dewan

Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara (KNKG, 2011).

Dalam topik *corporate governance*, struktur didalam perusahaan yang akan menjadi perhatian adalah struktur pada Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ-organ perusahaan, selain itu juga struktur pada komite komisaris, satuan pengawasan intern (SPI) dan sekretaris korporasi yang merupakan pendukung bagi perusahaan (Astanti, 2015)

Kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*two-board system*) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing, sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundangan (*fiduciary responsibility*). Sekalipun terdapat pemisahan fungsi, namun keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan. (Pangihutan Marpaung, 2015)

Pemahaman mengenai dewan komisaris juga dapat ditemui dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pasal 108 ayat (5) yang menyebutkan bahwa bagi perusahaan terbentuk perseroan terbatas, maka wajib memiliki sedikitnya 2 (dua) anggota dewan komisaris (Astanti, 2015). Dewan komisaris (yang selanjutnya disebut dewan) adalah organ perseroan yang bertugas

melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.(Achmad, 2012)

## **2. Kominsaris Independen**

komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar emiten sisa perusahaan publik, tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan public, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan public, dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik. (Amin Wijaja Tunggal, 2010)

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Tugas Komisaris Independen adalah menyuarakan kepentingan pemegang saham minoritas, menjadi ketua komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertindak efektif sebagai anggota Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi (KNKG, 2011).

Berdasarkan Peraturan Nomor IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Kep-643/BL/2012, bahwa Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia harus mempunyai Komisaris Independen yang proporsinya sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari komisaris independen maka akan mengurangi kesempatan manajer untuk berlaku agresif terhadap pajak perusahaan. Manajer melakukan agresivitas pajak perusahaan karena adanya kepentingan untuk meningkatkan laba perusahaan dengan cara mengurangi beban perusahaan termasuk beban pajak.

### **3. Komite Audit**

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. sedangkan Manual Komite Audit. (Amin Wijaja Tunggal, 2010). komite audit merupakan komite yang bekerja secara professional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dari GCG perusahaan. (Widjaja, 2012).

Menurut (Pangihutan Marpaung, 2015), Keanggotaan Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas sebagai Ketua Komite dan 2 (dua) orang ahli yang bukan merupakan pegawai perusahaan sebagai Anggota. Komite Audit bertugas untuk memantau dan mendorong agar laporan keuangan Perusahaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, meliputi kegiatan :

1. Mengatur proses penyusunan laporan keuangan dengan menekankan agar standard dan kebijakan keuangan atau prinsip - prinsip akuntansi

yang berlaku telah terpenuhi.

2. Menelaah laporan keuangan dan informasi lainnya telah disajikan berdasarkan data akuntansi keuangan atau manajemen secara benar dan akurat, dan asumsi yang dipakai sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

Menurut (KNKG, 2011) Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa:

1. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik.
3. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, termasuk pemenuhan kepatuhan kepada prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*)
4. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen

(Hanna dan Melinda Haryanto, 2016), Salah satu faktor penting yang menentukan tata kelola perusahaan dari perusahaan adalah independensi komite audit. Auditor memiliki tanggung jawab untuk memastikan jika posisi keuangan dan patrimonial diungkapkan secara andal oleh entitas.

#### **4. Dewan Direksi**

Menurut (Pangihutan Marpaung, 2015) Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perusahaan secara sehat dan beretika sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku untuk kepentingan dan pencapaian tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertindak

secara cermat, berhati-hati dan mempertimbangkan aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi harus menghindari kondisi di mana tugas dan kepentingan perusahaan berbenturan atau mempunyai potensi berbenturan dengan kepentingan pribadi, termasuk kepentingan perusahaan dengan kepentingan anak perusahaan

Menurut Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 (Achmad, 2012). Undang-undang ini mengatur fungsi dewan direksi dan dewan komisaris. Dewan direksi adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin perusahaan. Dewan direksi ini yang terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan.

#### **2.1.4 Agresivitas Pajak**

Menurut (Kuriyah & Asyik, 2016a), menyatakan bahwa perusahaan yang agresif terhadap pajak ditandai dengan transparansi yang lebih rendah. Menurut (Kamila, 2014) tindakan pajak agresif adalah tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion*. Tindakan pajak agresif tidak selalu berawal dari perilaku ketidakpatuhan akan peraturan perpajakan, tapi juga dari penghematan pajak yang dilakukan sesuai dengan peraturan. Semakin perusahaan memanfaatkan celah peraturan untuk menghemat beban pajak maka perusahaan dapat dianggap telah melakukan tindakan pajak agresif meskipun tindakan tersebut tidak menyalani peraturan yang ada. *Tax evasion* adalah upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, namun tidak aman bagi wajib pajak,

dimana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidak aman dalam koridor Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri . (Kristanto, 2016).

(Nugraha, 2015) berpendapat bahwa agresivitas pajak merupakan kegiatan spesifik yang mencakup transaksi yang tujuan utamanya adalah menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan memerlukan perencanaan yang baik.

(Fahriani & Priyadi, 2016), Keuntungan dan Kerugian dari Tindakan Pajak Agresif dapat memberikan *marginal benefit* maupun *marginal cost*. Marginal benefit yang mungkin didapat adalah adanya penghematan pajak (*tax saving*) yang signifikan bagi perusahaan sehingga porsi yang dapat dinikmati oleh pemilik akan menjadi lebih besar. Kemudian dengan melakukan tindakan pajak yang agresif juga dapat memberikan keuntungan kepada manajer baik secara langsung maupun tidak langsung. Manajer bisa mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi atas kinerjanya yang menghasilkan beban pajak perusahaan yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah. Selain itu manajer juga berkesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan melakukan *rent extraction*. *Rent extraction* adalah suatu tindakan manajer yang tidak memaksimalkan kepentingan pemilik, tindakan ini dapat berupa penyusunan laporan keuangan yang agresif, mengambil sumber daya atau asset perusahaan untuk kepentingan pribadi, maupun melakukan transaksi dengan pihak istimewa. Sedangkan *marginal cost* yang mungkin terjadi adalah sanksi administrasi yang dikenakan oleh petugas pajak yang merupakan akibat dari kemungkinan dilakukannya audit dan ditemukannya kecurangan-kecurangan di bidang perpajakan pada perusahaan. Jika

kecurangan-kecurangan tersebut ditemukan ketika dilakukan pemeriksaan maka akan berpotensi memunculkan biaya-biaya non-pajak lainnya yang tentu saja dapat merugikan perusahaan dan merusak reputasi perusahaan. Salah satu contohnya adalah menurunnya harga saham perusahaan. Penurunan harga saham ini adalah sebagai akibat adanya anggapan dari para pemegang saham bahwa tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh manajer merupakan tindakan *rent extraction* yang dapat merugikan pemegang saham.

Menurut (Kamila, 2014) Tujuan utama dari dilakukannya pajak agresif adalah untuk meminimalisir beban pajak perusahaan. Beban pajak diperoleh dari mengalikan pendapatan kena pajak dengan *tax rate* yang telah ditetapkan oleh negara. Pendapatan kena pajak sendiri diperoleh dari laba perusahaan dikurangi dengan koreksi pajak. Beban pajak yang ditanggung perusahaan bergantung pada koreksi pajak atau selisih antara laba dengan pendapatan kena pajak (*book-tax difference*). Maka teknik dalam melakukan pajak agresif adalah dengan mengatur *book-tax difference*. *Book-tax difference* terdiri dari dua komponen, perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Perbedaan permanen adalah perbedaan secara substantif antara laba akuntansi dan laba fiskal sehingga perbedaan ini selamanya akan muncul. Pada dasarnya perbedaan ini muncul karena adanya kebijakan dari otoritas perpajakan yang menghendaki penghapusan peraturan perundang-undangan agar tidak memberatkan salah satu sektor dari subsektor perekonomian sehingga menjadi insentif tersendiri bagi wajib pajak.,

Menurut (Kamila, 2014), setidaknya ada tiga keuntungan yang diperoleh dari tindakan pajak agresif, baik keuntungan yang didapat pemilik atau

atau pemegang saham maupun manajer sebagai berikut :

1. Adanya penghematan pajak yang dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga porsi yang dinikmati pemilik atau pemegang saham menjadi lebih besar.
2. Adanya bonus atau kompensasi yang mungkin diberikan pemilik atau pemegang saham kepada manajer atas tindakan pajak agresif yang telah dilakukannya dan menjadi keuntungan tersendiri bagi pemilik atau pemegang saham.
3. Adanya kesempatan bagi manajer untuk melakukan *rent extraction*. *Rent extraction* adalah tindakan manajer yang dilakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik, melainkan untuk kepentingan pribadi. Tindakan ini dapat berupa penyusunan laporan keuangan agresif atau melakukan transaksi dengan pihak istimewa.

## **2.1.5 Teori Hubungan Variabel Independen dan Variabel Dependen**

### **2.1.5.1. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Agresivitas Pajak**

Menurut Winarsih (Seprini, 2016), semakin besar ukuran/jumlah dewan komisaris maka akan semakin besar pula tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat kemungkinan yang menyebabkan hal ini terjadi misalnya saja dikarenakan rendahnya kualitas koordinasi antar anggota dewan komisaris. Aktivitas pengawasan manajer dari dewan komisaris akan lebih efektif jika didominasi oleh dewan independen.

Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Fahriani & Priyadi, 2016), yang menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif

terhadap Effective Tax rates dan penelitian yang dilakukan Winarsih et al (2014) mengenai pengaruh *good corporate governance dan corporate social responsibility* terhadap tindakan pajak agresif. Hal ini dapat diartikan apabila semakin meningkat jumlah komisaris independen, maka tindakan pajak agresif yang dilakukan akan semakin tinggi. Begitu pula dengan sebaliknya.

#### **2.1.5.2. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak**

Menurut (Fahriani & Priyadi, 2016), menyatakan bahwa komisaris independen merupakan salah satu sarana untuk memonitor manajemen. Kepemilikan Institusional memiliki arti penting dalam perusahaan, keberadaan mereka dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Sehingga dapat disimpulkan komisaris independen sebagai pengawas yang mendorong manajemen perusahaan dengan melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan agar dalam menghasilkan laba berdasarkan aturan yang berlaku, karena pada dasarnya komisaris independen lebih melihat seberapa jauh manajemen taat kepada aturan dalam menghasilkan laba, salah satunya adalah mematuhi peraturan pajak yang berlaku dan meminimalisir adanya tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan.

Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Imam Fadli, 2013) yang menyatakan komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan, dapat diterima, dan berpengaruh negatif, dan penelitian (Suyanto, Krisnata Dwi;, 2012), Koefisien regresi komisaris independen (KI) terhadap *effective tax rate* menunjukkan arah negatif. kehadiran komisaris

independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan kinerja direksi. Dimana dengan semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat. Manajemen kerap kali bersifat oportunistik dimana mereka memiliki motif untuk memaksimalkan laba bersih agar meningkatkan bonus. Laba selama ini dijadikan indikator utama keberhasilan manajer. Salah satu cara meningkatkan laba bersih adalah dengan menekan biaya-biaya termasuk pajak. Sehingga dapat mendorong manajer menjadi agresif terhadap pajak. Diharapkan semakin besar proporsi komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah agresivitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen. (Suyanto, Krisnata Dwi, 2012)

#### **2.1.5.3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak**

(Fahriani & Priyadi, 2016), keberadaan komite audit dapat dirasakan sebagai indikasi monitoring kualitas tinggi dan berpengaruh signifikan dalam menyediakan informasi yang lebih kepada pemakai laporan keuangan. Menurut (Winata, 2014), tugas dari komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Dengan kata lain komite audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan.

Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan (Hanna dan Melinda Haryanto, 2016), komite audit terhadap agresivitas pajak menunjukkan arah positif menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dan (Fahriani & Priyadi, 2016) yang menyatakan bahwa komite

audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Dengan adanya hal tersebut maka, komite audit dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat sehingga akan mengurangi juga tindakan kecurangan oleh manajemen dan tindakannya akan melanggar hukum lainnya. Anisa (Winata, 2014).

#### **2.1.5.4. Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Agresivitas Pajak**

(Alifianti, Putri, & Chariri, 2017), Dewan direksi merupakan peranan sentral dalam *good corporate governance*. Fungsi direksi adalah sebagai wakil dewan komisaris dalam tata kelola perusahaan. Semakin banyak proporsi dewan direksi dalam suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pula kompetensi yang terjadi untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Keberadaan dewan direksi diharapkan akan mampu mengurangi benturan kepentingan tersebut. menyatakan bahwa ukuran dan jumlah dewan direksi mampu mengurangi permasalahan yang ada.

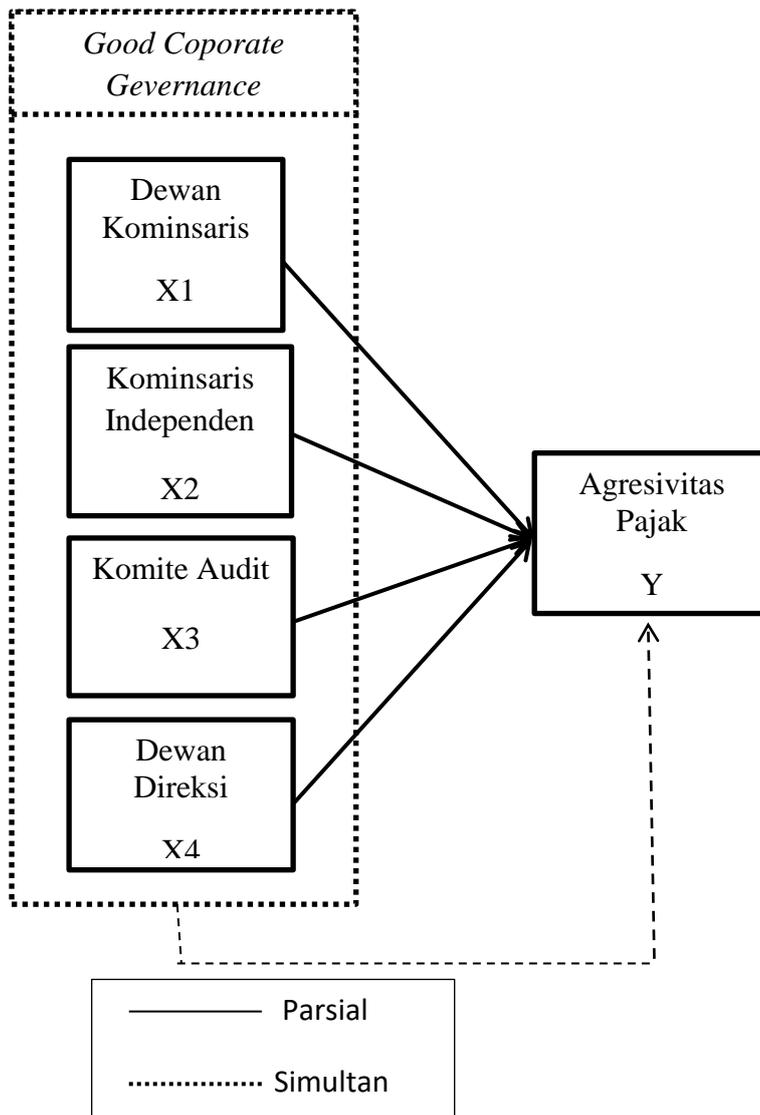
Hal ini diperkuat oleh adanya penelitian yang dilakukan oleh (Fahrhani & Priyadi, 2016), yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap *Effective Tax rates* dapat diartikan apabila semakin banyak jumlah dewan direksi, maka tindakan pajak agresif akan semakin tinggi. Begitu pula dengan sebaliknya, semakin kecil jumlah dewan direksi, maka tindakan pajak agresif akan semakin kecil.

## **2.2. KERANGKA PEMIKIRAN**

Penelitian ini ditujukan untuk melakukan pengujian untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara *Good Corporate Governance* terhadap pengaruh

Agresivitas Pajak. Kerangka pemikiran di tersebut dapat dituangkan dalam model penelitian sebagai berikut:

Variabel Independen (X)                      Variabel dependen (Y)



Sumber : olah data 2018

Keterangan:

————— : Pengaruh hubungan secara parsial variable  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$

Dan X<sub>4</sub> ke Variabel Y

----- : Pengaruh hubungan secara simultan variable X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>  
dan X<sub>4</sub> ke Variabel Y

### 2.3. HIPOTESIS

Menurut (Sekaran, 2009), hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hubungan tersebut diperkirakan berdasarkan jaringan asosiasi yang ditetapkan dalam kerangka teoritis yang dirumuskan untuk studi penelitian. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan perkiraan hubungan, diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan.

Menurut (Narbuko, 2016), hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya sehingga masih harus dibuktikan kenyataannya. Hipotesis dibangun oleh teori dan teori dibangun dengan data yang tersusun dalam satu pemikiran yang sistematis.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara variabel independen *good corporate governance* (dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan dewan direksi) terhadap variabel dependen (agresivitas pajak) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2017. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu: “*good corporate governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak”.

H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh antara dewan komisaris terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei tahun 2012-2017.

H<sub>2</sub> : Terdapat pengaruh antara komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bea tahun 2012-2017.

H<sub>3</sub> : Terdapat pengaruh antara komite audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bea tahun 2012-2017.

H<sub>4</sub> : Terdapat pengaruh antara dewan direksi terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bea tahun 2012-2017.

#### **2.4. Peneliti Terdahulu**

1. (Fahriani & Priyadi, 2016) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” dengan periode pengamatan yaitu tahun 2009-2013, Metode pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Sebelum data diolah, dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Hasil Pengujian *good corporate governance* terhadap tindakan pajak agresif menunjukkan bahwa dewan komisaris tingkat signifikansi sebesar 0,049 dan menunjukkan angka pengaruh positif dengan angka 1,990 terhadap *Effective Tax rates*, dewan direksi berpengaruh positif terhadap *Effective Tax rates* dengan mempunyai nilai t hitung sebesar 2,003 dengan signifikansi sebesar 0,048 <( 0,05). dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *Effective Tax rates* dengan mempunyai nilai t hitung sebesar 4,561 dengan signifikansi sebesar 0,000 <( 0,05), dan

komite audit berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax rates* dengan mempunyai nilai t hitung sebesar -1,588 dengan signifikansi sebesar 0,115 >( 0,05).

2. (Antonio Lopo Martinez, 2014) *With respect to the results in Table 3, it should first be noted that all the variables have high t-statistics, meaning that all have a significant relation with audit fees at the 5% level. The analysis of the coefficients confirms the theoretical prediction of a positive relationship between tax avoidance and audit fees, as well as between audit fees on the one hand and company size, audit firm size, indebtedness, corporate governance and the interaction of tax avoidance, audit firm size and corporate governance. In contrast, the performance variable (ROA) and the interactions of tax avoidance x corporate governance and audit firm size x corporate governance have negative coefficients, indicating an inverse relationship with audit fees.*
3. (Hanna dan Melinda Haryanto, 2016), melakukan penelitian yang berjudul “pengaruh Agresivitas pelaporan keuangan, Tata Kelola Perusahaan dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak pada Semua Perusahaan yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia. Dengan periode pengamatan yaitu tahun 2010-2014, Metode pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Family ownership* terhadap agresivitas pajak menunjukkan arah negatif sebesar 0,0036. Nilai p value dari *family*

*ownership* terhadap agresivitas pajak (0,883) berada diatas signifikan  $\alpha = 5\%$ , menunjukkan bahwa family ownership tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak yang berarti perusahaan yang dimiliki oleh keluarga ataupun *non* keluarga, komisaris independen terhadap agresivitas pajak menunjukkan arah negative sebesar 0,1495. Nilai p value dari komisaris independen terhadap agresivitas pajak (0,054) berada diatas signifikan  $\alpha = 5\%$ , menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Komite audit terhadap agresivitas pajak menunjukkan arah positif sebesar 0,2013. Nilai p value dari komite audit terhadap agresivitas pajak (0,005) berada dibawah signifikan  $\alpha = 5\%$ , menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak menunjukkan arah positive sebesar 0,998. Nilai p value dari kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak (0,018) berada dibawah signifikan  $\alpha = 5\%$ , menunjukkan bahwa kepemilikan *institusional* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. agresivitas pelaporan keuangan terhadap agresivitas pajak menunjukkan arah positive sebesar 0,058. Nilai p value dari agresivitas pelaporan keuangan terhadap agresivitas pajak (0,0088) berada diatas signifikan  $\alpha = 5\%$ , menunjukkan bahwa agresivitas pelaporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. *leverage* terhadap *agresivitas* pajak menunjukkan arah positif sebesar 0,2025. Nilai p value dari leverage terhadap agresivitas pajak

(0,130) berada diatas signifikan  $\alpha = 5\%$ , menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. ROA terhadap agresivitas pajak menunjukkan arah negatif sebesar 0,051. Nilai p *value* dari ROA terhadap agresivitas pajak (0,95) berada diatas signifikan  $\alpha = 5\%$ , menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dan ukuran perusahaan (*size*) terhadap agresivitas pajak menunjukkan arah positif sebesar 0,0535. Nilai p *value* dari *size* terhadap agresivitas pajak (0,074) berada diatas signifikan  $\alpha = 5\%$ , menunjukkan bahwa *size* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

4. (Seprini, 2016) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Tindakan Pajak Agresif pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI. Dengan periode pengamatan yaitu tahun 2011-2013, Metode pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan SPSS 20. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa signifikansi dewan komisaris menunjukan nilai sebesar  $0,018 < 0,05$ , dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif. Signifikansi kepemilikan manajerial menunjukan nilai sebesar  $0,043 < 0,05$ , dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Signifikansi komite audit menunjukan nilai sebesar  $0,026 < 0,05$ , dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa intensitas pertemuan komite audit berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif. Signifikansi kualitas audit menunjukkan nilai sebesar  $0,000 < 0,05$ , dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif. Dan signifikansi *corporate social responsibility* menunjukkan nilai sebesar  $0,009 < 0,05$ , dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif.

5. (Boussaidi, 2015) *The research is titled “ The Impact of Governance Mekanisme on Tax Aggressiveness: Empirical Evidence from Turnisian Context” The study is based on the analysis of a sample of Tunisian listed firms over the 2006-2012. the results of this study show that corporate board size the relationship seems insignificant, the smaller corporate board is likely increases the decision-making and regulatory compliance and thereby reduces the amount of tax aggressiveness. Gender diversity in corporate board, The variable gender diversity on the board is very significant at the 1% level (p-value = 0.000) with a positive sign. managerial ownership shows the existence of a negative relationship and statistically significant at the 1% level (p-value = 0.003) between the managerial ownership and tax aggressiveness. Regression analyzes also reveal that some companies’ characteristics have a significant effect on the tax aggressiveness. We note that company size and debt levels are able to reduce tax*

*aggressiveness. However, the level of growth and privileged sector of the company reinforces tax aggressiveness activities. Overall, we can conclude that some governance mechanisms have a significant impact on reducing the level of tax aggressiveness of Tunisian companies, but it seems surprising that some of these mechanisms encourage reducing taxes.*

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian kuantitatif adalah pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis dan merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, eksperimental, atau empiris. (Rumengan, 2010).

Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk memberikan gambaran pemecahan masalah yang ada berdasarkan pada analisis dan intepretasi data.

(Indriantoro, 2013), mendefinisikan penelitian kuantitatif sebagai penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan skala numerik (angka) yang dapat dianalisis dengan menggunakan analisis statistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kausal komparatif yaitu penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab- akibat antara dua variabel atau lebih serta mengumpulkan data setelah terjadinya suatu fakta atau peristiwa.

#### **3.2. Jenis data**

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data dalam penelitian ini bersumber dari laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia untuk periode 2013-2018. Menurut (Indriantoro, 2013), data

sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Sedangkan menurut (Sunyoto, 2011), data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang apakah ada tidaknya hubungan dengan objek penelitian atau dapat dilakukan dengan menggunakan data dari Biro Pusat Statistik (BPS).

### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### **3.2.1. Dokumentasi**

Metode dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data dari laporan keuangan perusahaan berupa laporan keuangan tahunan dan laporan auditor independen perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesiayang di publikasikan melalui [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

#### **3.2.2. Studi Pustaka**

Studi pustaka dapat dilakukan dengan mencari berbagai rujukan atau literatur tentang berbagai teori yang memiliki kaitan dan relevansi dengan topik penelitian. Metode studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur, baik buku, jurnal, yang sesuai.

### **3.4. Populasi dan Sampel**

#### **3.4.1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2013-2018. Menurut (Sugiyono, 2013), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Selanjutnya menurut (Sugiyono, 2013), bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Oleh karena itu, sampel yang diambil dari populasi harus representatif (mewakili).

**Tabel 3.1**

#### **Populasi Perusahaan**

<b>NO.</b>	<b>KODE</b>	<b>NAMA PERUSAHAAN</b>
1.	INTP	Indocement Tunggul Prakasa Tbk
2.	SMCB	Holcim Indonesia Tbk
3.	SMGR	Semen Gresik Tbk
4.	AMFG	Asahimas Flat Glass Tbk
5.	ARNA	Arwana Citra Mulia Tbk
6.	IKAI	Inti Keramik Alam Asri Industri Tbk
7.	KIAS	Keramika Indonesia Assosiasi Tbk
8.	MLIA	Mulia Industrindo Tbk
9.	TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk
10.	ALKA	Alaska Industrindo Tbk
11.	ALMI	Alumindo Light Metal Industry Tbk
12.	BTON	Beton Jaya Manunggal Tbk
13.	CTBN	Citra Turbindo Tbk
14.	GDST	Gunawan Dianjaya Steel Tbk
15.	INAI	Indal Aluminium Industry Tbk

16.	ITMA	Itamaraya Tbk
17.	JKSW	Jakarta Kyoei Steel Work LTD Tbk
18.	JPRS	Jaya Pari Steel Tbk
19.	KRAS	Krakatau Steel Tbk
20.	LION	Lion Metal Works Tbk
21.	LMSH	Lionmesh Prima Tbk
22.	MYRX	Hanson International Tbk
23.	NIKL	Pelat Timah Nusantara Tbk
24.	PICO	Pelangi Indah Canindo Tbk
25.	TBMS	Tembaga Mulia Semanan Tbk
26.	BRPT	Barito Pasific Tbk
27.	BUDI	Budi Acid Jaya Tbk
28.	DPNS	Duta Pertiwi Nusantara
29.	EKAD	Ekadharna International Tbk
30.	ETWA	Eterindo Wahanatama Tbk
31.	INCI	Intan Wijaya International Tbk
32.	SOBI	Sorini Agro Asia Corporindo Tbk
33.	SRSN	Indo Acitama Tbk
34.	TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk
35.	UNIC	Unggul Indah Cahaya Tbk
36.	AKUU	Alam Karya Unggul Tbk
37.	AKPI	Argha Karya Prima Industry Tbk
38.	APL	Asiaplast Industries Tbk
39.	BRNA	Berlina Tbk
40.	FPNI	Titan Kimia Nusantara Tbk
41.	IGAR	Champion Pasific Indonesia Tbk
42.	IPOL	Indopoly Swakarsa Industry Tbk
43.	SIAP	Sekawan Intipratama Tbk
44.	SIMA	Siwani Makmur Tbk
45.	TRST	Trias Sentosa Tbk
46.	YPAS	Yana Prima Hasta Persada Tbk
47.	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
48.	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk
49.	MAIN	Malindo Feedmill Tbk
50.	SPID	Siearad Produce Tbk
51.	SULI	Sumalindo Lestari Jaya Tbk
52.	TIRT	Tirta Mahakam Resources Tbk
53.	ALDO	Alkindo Naratama Tbk
54.	FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk
55.	INKP	Indah Kiat Pulp & paper Tbk
56.	INRU	Toba Pulp Lestari Tbk
57.	KBRI	Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk
58.	SAIP	Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk
59.	SPMA	Suparma Tbk

60.	TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
61.	ASII	Astra International Tbk
62.	AUTO	Astra Auto Part Tbk
63.	BRAM	Indo Kordsa Tbk
64.	GDYR	Goodyear Indonesia Tbk
65.	GJTL	Gajah Tunggal Tbk
67.	IMAS	Indomobil Sukses International Tbk
68.	INDS	Indospring Tbk
69.	LPIN	Multi Prima Sejahtera Tbk
70.	MASA	Multistrada Arah Sarana Tbk
71.	NIPS	Nipress Tbk
72.	PRAS	Prima alloy steel Universal Tbk
73.	ADMG	Polychem Indonesia Tbk
74.	ARGO	Argo Pantes Tbk
75.	CNTX	Centex Tbk
76.	ESTI	Ever Shine Textile Industry Tbk
77.	INDR	Indo Rama Synthetic Tbk
78.	SSTM	Sunson Textile Manufacturer Tbk
80.	UNIT	Nusantara Inti Corpora Tbk
81.	UNTX	Unitex Tbk
82.	BIMA	Primarindo Asia Infrastructure Tbk
83.	SIMM	Surya Intrindo Makmur Tbk
84.	IKBI	Sumi Indo Kabel Tbk
85.	JECC	Jembo Cable Company Tbk
86.	KBLI	KMI Wire and Cable Tbk
87.	KBLM	Kabelindo Murni Tbk
88.	SCCO	Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk
89.	VOKS	Voksel Electric Tbk
90.	PTSN	Sat Nusa Persada Tbk
91.	ADES	Akasha Wira International Tbk
92.	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
93.	CEKA	Cahaya Kalbar Tbk
94.	DAVO	Davomas Abadi Tbk
95.	DLTA	Delta Djakarta Tbk
96.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
97.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
98.	MULTI	Multi Bintang Indonesia Tbk
99.	MYOR	Mayora Indah Tbk
100.	PSDN	Prashida Aneka Niaga Tbk
101.	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk
102.	SKLT	Sekar Laut Tbk
103.	STTP	Siantar Top Tbk
104.	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk
105.	GGRM	Gudang Garam Tbk

106.	HMSP	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
107.	RMBA	Bentoel International Investama Tbk
108.	DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk
109.	INAF	Indofarma Tbk
110.	KAEF	Kimia Farma Tbk
111.	KLBF	Kalbe Farma Tbk
112.	MERK	Merck Tbk
113.	PYFA	Pyridam Farma Tbk
114.	SCPI	Schering Plough Indonesia Tbk
115.	SQBI	Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
120.	TSPC	Tempo Scan Pasific Tbk
121.	MBTO	Martina Berto Tbk
122.	MRAT	Mustika Ratu Tbk
123.	TCID	Mandom Indonesia Tbk
124.	UNVR	Unilever Indonesia Tbk
125.	KDSI	Kedawung Setia Industrial Tbk
126.	KICI	Kedaung Indag Can Tbk
127.	LMPI	Langgeng Makmur Industry Tbk
128.	ESTI	Ever Shine Textile Industry Tbk
129.	HDTX	Pan Asia Indosyntec Tbk
130.	INDR	Indo Rama Synthetic Tbk
131.	KARW	Karwell Indonesia Tbk
132.	MYTX	Apac Citra Centertex Tbk
133.	PAFI	Pan Asia Filament Inti Tbk

Sumber: Data sekunder diolah (2018)

### 3.4.2 Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut (Purwanto, 2009), penarikan sampel *purposive* adalah penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. pertimbangan tersebut didasarkan pada kepentingan dan tujuan penelitian. Sedangkan menurut (Wiratna, 2016), *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.

Adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2018
2. Terdapat laporan keuangan tahunan selama 6 tahun berturut-turut (tahun 2013-2018) yang dapat diakses dari situs BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).)
3. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dengan nilai rupiah.
4. Perusahaan menyajikan data perusahaan yang lengkap dan jelas berkaitan dengan penelitian.
5. Dari beberapa perusahaan tersebut terdapat 13 perusahaan yang masuk dalam kriteria jadi  $13 \times 6 = 78$  sampel perusahaan.

Berdasarkan kriteria di atas, maka ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah perusahaan dengan rincian dapat dilihat dalam table 3.2 sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Proses Pemilihan Sampel**

No.	Keterangan	Jumlah Perusahaan
1.	Populasi (perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2018)	133
2.	Terdapat laporan keuangan tahunan selama 6 tahun berturut-turut (tahun 2013-2018) yang dapat diakses dari situs BEI ( <a href="http://www.idx.co.id">www.idx.co.id</a> .)	(76)
3.	Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dengan nilai rupiah	(44)
4.	Perusahaan menyajikan data perusahaan yang lengkap dan jelas.	(13)
Jumlah sampel akhir		13
Tahun pengamatan		6 tahun
Jumlah pengamatan		78

*Sumber:* Data sekunder diolah (2019)

**Tabel 3.3**

**Sampel Perusahaan**

No	Kode	Nama Perusahaan
1.	AKPI	PT. Argha Karya Prima Ind Tbk
2.	APLI	PT. Asiaplast Industries Tbk
3.	ASII	PT. Astra International Tbk
4.	CPIN	PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk
5.	DLTA	PT. Delta Djakarta Tbk
6.	DPNS	PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk
7.	INTP	PT. Indocement Tunggul Prakasa Tbk
8.	SMGR	PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk
9.	SRSN	PT. Indo Acidatama Tbk
10.	TCID	PT. Mandom Indonesia Tbk
11.	TOTO	PT. Surya Toto Indonesia Tbk
12.	TRST	PT. Trias Sentosa Tbk
13.	TSPC	PT. Tempo Scan Pacific Tbk

*Sumber:* Data sekunder diolah (2019)

**3.5. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL**

Menurut (Indriantoro, 2013), definisi operasional adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara-cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *good coeperate governance* yang terdiri dari dewan kominsaris, kominsaris independen, komite audit dan dewan direksi . variabel independen (variabel bebas) merupakan

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

(Sugiyono, 2013) Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu agresivitas pajak. Menurut (Sugiyono, 2016), variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Adapun definisi operasional variabel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dewan Kominsaris

Menurut (KNKG, 2011), Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas, bertanggungjawab secara kolektif dalam melakukan pengawasan, dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan tugasnya dengan baik. Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara.

2. Kominsaris Independen

Menurut (Amin Wijaja Tunggal, 2010) komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar emiten sisa perusahaan publik, tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik, dan tidak memiliki hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak

langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

3. Komite Audit

Menurut (Widjaja, 2012) komite audit merupakan komite yang bekerja secara profesional dan independen dibentuk oleh dewan komisaris tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan dari GCG perusahaan.

4. Dewan Direksi

Menurut (Pangihutan Marpaung, 2015) Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perusahaan secara sehat dan ber-etika sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku untuk kepentingan dan pencapaian tujuan perusahaan.

5. Agresivitas Pajak

(Nugraha, 2015) berpendapat bahwa agresivitas pajak merupakan kegiatan spesifik yang mencakup transaksi yang tujuan utamanya adalah menurunkan kewajiban pajak perusahaan.

### **3.6. Teknik Pengolahan Data**

Adapun langkah-langkah teknik pengolahan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam rumus atau formula yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan angka dewan komisaris dalam penelitian ini adalah:

Ukuran Dewan Komisaris dihitung dengan menghitung jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan.

*Sumber* : (Seprini, 2016)

2. Untuk mendapatkan angka kominsaris independen dalam penelitian ini digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Komisaris independen} = \frac{\text{Jumlah Kominsaris Independen}}{\text{Total Dewan Kominsaris}}$$

*Sumber* : (Irvan Tiras & henaryanto Wijaya, 2015)

3. Untuk mendapatkan angka komite audit dalam penelitian ini digunakan rumus sebagai berikut:

KA = Jumlah keberadaan komite audit dalam perusahaan i pada tahun t

*Sumber* : (Fahriani & Priyadi, 2016)

4. Untuk mendapatkan angka dewan direksi dalam penelitian ini digunakan rumus sebagai berikut:

DD = Jumlah keberadaan dewan direksi dalam perusahaan i pada tahun t

*Sumber* : (Fahriani & Priyadi, 2016)

5. Untuk mendapatkan angka agresivitas pajak dalam penelitian ini digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}} \quad \text{ETR} = \text{Effective Tax Rate}$$

Sumber : (Kuriyah & Asyik, 2016b)

### **3.7. Teknik Analisa Data**

Dalam pengujian penelitian digunakan model statistik perametik sehingga sebelum analisis data diperlukan uji asumsi klasik terlebih dahulu sebelum dilakukan pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik bertujuan untuk mendapatkan estimasi serta kesimpulan yang lebih tepat dalam penelitian. Uji asumsi klasik dianggap penting, sebab untuk mengetahui terpenuhinya syarat-syarat digunakan regresi berganda. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

#### **3.7.1. Uji Normalitas**

Menurut (Priyatno, 2012), uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal.

Uji asumsi ini akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi secara normal atau berdistribusi secara tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau tidak normal. Menurut (Wijaya, 2012), uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal.

Uji normalitas bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan “Normal P-P Plot” dan “Tabel Kolmogorov smitnov” yang paling umum digunakan adalah Normal P-P Plot” Pada Normal P-P Plot prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

### **3.7.2. Uji Multikolenieritas**

Menurut (Sunyoto, 2013), uji asumsi klasik multikolinieritas diterapkan untuk analisis regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas atau independent variable ( $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ ) di mana akan diukur keeratan hubungan antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi ( $r$ ). Dikatakan terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas ( $x_1$  dan  $x_2$ ,  $x_2$  dan  $x_3$ , dan seterusnya) lebih besar dari 0,60. Dikatakan tidak multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 ( $r \leq 0,60$ ).

Menurut (Priyatno, 2012), multikolinieritas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel independen. Uji multikolieneritas digunakan untuk

mengetahui apakah ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinieritas. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritasnya dapat dilihat dari *value Inflation Factor* (VIP) dan nilai *Tolerance*. Apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10 untuk kedua variabel, maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah multikolinieritas. (Priyatno, 2013)

Menurut (Wiratna, 2016), cara mengatasi multikolinieritas antara lain sebagai berikut:

- a. Transformasi variabel merupakan cara mengurangi hubungan linier di antara variabel bebas. Transformasi dilakukan dalam bentuk logaritma.
- b. Keluarkan satu atau lebih variabel bebas yang mempunyai korelasi yang tinggi dari model regresi dan identifikasikan variabel bebas lainnya untuk membantu prediksi.
- c. Gunakan model dengan variabel bebas yang mempunyai korelasi tinggi hanya semata-mata untuk prediksi dan tidak untuk diinterpretasikan.
- d. Gunakan korelasi sederhana antara setiap variabel bebas dan variabel terikat untuk memahami hubungan variabel bebas dan variabel terikat lainnya.

### **3.7.3. Uji Autokorelasi**

Menurut (Priyatno, 2012), autokorelasi adalah keadaan dimana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode  $t$  dengan residual pada periode sebelumnya  $(t-1)$ , Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi.

Menurut (Sunyoto, 2011), persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut tidak baik/ tidak layak dipakai prediksi. Masalah autokorelasi baru timbul jika ada korelasi secara linear antara kesalahan pengganggu periode  $t$  (berada ) dengan kesalahan pengganggu  $t-1$  (sebelumnya).

Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin – Waston (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW di bawah- 2 ( $DW < -2$ )
2. Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW di antara -2 dan +2 atau  $-2 \leq DW \leq +2$
3. Terjadi autokorelasi negative, jika nilai DW di atas +2 ( $DW > +2$ )

#### **3.7.4. Uji Heteroskedastisitas**

Menurut (Sunyoto, 2013), dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai variabel yang sama disebut terjadi homoskedastisitas dan jika variannya tidak sama atau berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas. Persamaan regresi baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas.

Menurut (Priyatno, 2012), heteroskedastisitas adalah keadaan dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi.

### **3.7.5. Analisis Statistik**

#### **3.7.5.1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Menurut (Purwanto, 2009), koefisien determinasi menunjukkan suatu proporsi dari varian yang dapat diterangkan oleh persamaan regresi terhadap varian total. Nilai  $R^2$  akan berkisar 0 sampai 1. Nilai  $R^2 = 1$  menunjukkan bahwa 100% total variasi diterangkan oleh varian persamaan regresi atau variabel bebas. Sebaliknya apabila  $R^2 = 0$  menunjukkan bahwa tidak ada total variasi yang diterangkan oleh varian bebas dari persamaan regresi. Nilai koefisien determinasi lebih besar dari 0,5 menunjukkan variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat dengan baik atau kuat, sama dengan 0,5 dikatakan sedang, dan apabila kurang dari 0,5 relatif kurang baik. Lind (Purwanto, 2009).

Menurut (Wiratna, 2016), apabila variabel independen jumlahnya lebih dari 2, untuk membaca koefisien determinasi menggunakan nilai *adjusted R square*. Apabila variabel independen berjumlah 2 dan kurang dari 2 maka untuk membaca koefisien determinasi menggunakan nilai *R Square*.

#### **3.7.5.2. Uji Signifikansi Simultan ( Uji F )**

Menurut (Gozali, 2013), Uji simultan atau uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model statistic mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Untuk uji signifikansi simultan dibentuk hipotesis:

Ho :  $b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$ , artinya semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel independen.

$H_a : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$ , artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel independen.

Menurut (Gozali, 2011), dasar pengambilan keputusannya adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu:

1. Apabila probabilitas signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak
2. Apabila probabilitas signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

### **3.7.5.3. Analisis Regresi Linear Berganda**

Menurut (Sunyoto, 2011), pengujian ini dilakukan untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan masing-masing nilai koefisien regresi ( $b_i$ ) secara simultan terhadap variabel terikat ( $Y$ ). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif .

(1)  $H_0 : b_i = 0$  (nilai koefisien regresi predictor  $X_{1,2..n}$  tidak signifikan atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel  $X$  terhadap variabel  $Y$  secara simultan)

(2)  $H_a : b_i \neq 0$  (nilai koefisien regresi predictor  $X_{1,2..n}$  signifikan atau terdapat pengaruh yang signifikan variabel  $X$  terhadap variabel  $Y$  )

Menurut (Priyatno, 2010), Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, X_3$  dan  $X_4$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ ).

Analisis ini untuk memprediksikan nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk

mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif terhadap variabel  $x$  dan  $y$ .

$$ETR = \alpha + \beta_1 DK + \beta_2 DD + \beta_3 KA + \beta_4 KI + \varepsilon$$

Dimana :

ETR = Effective tax rates

A = Konstanta

DK = Dewan Komisaris

DD = Dewan Direksi

KA = Komite Audit

KI = Komisaris Independen

$\beta_1$ — $\beta_2$  = Koefisien Regresi

$\varepsilon$  = Standar Error

#### **3.7.5.4. Uji Hipotesis**

Menurut (Purwanto, 2009), pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak.

Menurut (Wiratna, 2016), kriteria menerima ataupun menolak hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Jika  $\text{sig} > 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima;
2. Jika  $\text{sig} < 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, T. (2012). Dewan Komisaris Dan Transparansi : Teori Keagenan Atau Teori Stewardship ? *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 16(1), 1–12.
- Alifianti, R., Putri, H., & Chariri, A. (2017). PENGARUH FINANCIAL DISTRESS DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PRAKTIK TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2015), 1–11.
- Amin Wijaja Tunggal. (2010). *Principles Of Internal Auditing* (Harvindo). Jakarta.
- Astanti, D. I. (2015). *GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN ASURANSI EDISI REVISI*. Semarang: SEMARANG UNIVERSITY PRESS.
- Boussaidi, A. (2015). THE IMPACT OF GOVERNANCE MECHANISMS ON TAX AGGRESSIVENESS : EMPIRICAL EVIDENCE FROM TUNISIAN CONTEXT 2 . TAX AGGRESSIVENESS: LIGHTING AND DISTINCTION. *Journal of Asian Business Strategy*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.18488/journal.1006/2015.5.1/1006.1.1.12>
- Fahmi, I. (2011). *Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fahriani, M., & Priyadi, M. P. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(7), 1–20.
- Gozali, I. (2011). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS19*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gozali, I. (2013). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS21.(Ed.7)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hadika, I. G., & Wirawan, K. (2018). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Pengaruh Kepemilikan Keluarga dan Ukuran Perusahaan Pada Agresivitas Pajak dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), 23, 595–625.
- Hanna dan Melinda Haryanto. (2016). AGRESIVITAS PELAPORAN KEUANGAN, AGRESIVITAS PAJAK, TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN KELUARGA. *Journal of Accounting and Public Policy*, XX(03), 407–419. <https://doi.org/10.1108/01443580810887823>

- Hery. (2014). *Akuntansi Dasar 1 dan 2*. Jakarta: Grasindo.
- Hery. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Center For Academic Publishing Services.
- Imam Fadli. (2013). PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, KOMISARIS INDEPENDEN, MANAJEMEN LABA,DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013). *JOM Fekon*, 3(1).
- Indriantoro, N. dan B. S. (2013). *Metodologi Penelitian untuk Akuntansi dan Bisnis. Edisi Pertama Cetakan Keenam*. Yogyakarta: BPFE.
- Kamila, P. A. (2014). Analisis hubungan agresivitas pelaporan keuangan dan agresivitas pajak. *Finance and Banking Journal*, 16(2).
- KNKG. (2011). *PEDOMAN UMUM GOOD GOVERNANCE BISNIS SYARIAH DITERBITKAN OLEH KOMITE NASIONAL KEBIJAKAN GOVERNANCE. KOMITE NASIONAL KEBIJAKAN GOVERNANCE*.
- Kristanto, A. B. (2016). Faktor finansial dan non finansial yang mempengaruhi agresivitas pajak di indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 16(1), 53–68.
- Kuriah, H. L., & Asyik, N. F. (2016). PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN CORPORATE SOCIAL. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(3).
- mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Martani, D. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, Buku 1, Cetakan Kelima*. Jakarta: Salemba Empat.
- Narbuko, C. dan H. A. A. (2016). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Novitasari, S., Vince, P., & Silfi, A. (2017). PENGARUH MANAJEMEN LABA, CORPORATE GOVERNANCE, DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2010-2014) Oleh. *JOM Fekon*, 4(1).
- Nugraha, M. (2015). Diponegoro Journal of Accounting. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 4 No.(PENGARUH CORPORATE SOCIAL

RESPONSIBILITY, UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK), 1–14. Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

- Pandangan, L. (2014). *ADMINISTRASI PERPAJAKAN*. Erlangga: Jakarta.
- Pangihutan Marpaung. (2015). *PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN ( Code of Corporate Governance )*. Jakarta Timur: PERUMNAS.
- Priyatno, D. (2010). *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendadaran*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Priyatno, D. (2012). *Mandiri Belajar Analisa Dengan SPSS*. Jakarta: media kom.
- Priyatno, D. (2013). *Analisis korelasi, Regresi, dan Multivariate dengan SPSS*. Jakarta: Gava Media.
- Purwanto, S. (2009). . *Statistika Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modern Edisi 2 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus (Buku 1 Edisi)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rumengan, J. (2010). *Metodologi Penelitian dengan SPSS*. Batam: Uniba Press.
- Sadasiha, Y. G., & Hadiprajitno, P. B. (2014). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Property, Real Estate dan Building Construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3), 1–15.
- Sekaran, U. (2009). *Research Methods for Business Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Seprini. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Sosial Responsibility Tindakan Pajak Agresif (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI 2011-2013). *JOM Fekon*, 3(1), 2238–2252.
- Simanjuntak Payman. j. (2011). *manajemen dan evaluasi kinerja edisi ke 4*. jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2016). , *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

Bandung: ALFABETA.

- Sunyoto, D. (2011). *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi, Cetakan 1*. Yogyakarta: CAPS.
- Sunyoto, D. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suparmono, T. D. (2009). *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Suyanto, Krisnata Dwi;, S. (2012). Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Afresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*. Vol 16, No. 2, 16(2), 167–177.
- Tandiontong, M. (2016). *Kualitas Audit Dan Pengukurannya*. Bandung: Alfabeta.
- waluyo. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widjaja, T. A. (2012). *The Fraud Audit Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan Akuntansi*. Jakarta: Harvindo.
- Wijaya, T. (2012). *Praktis dan Sampel Cepat Menguasai SPSS 20 untuk olah dan Interpretasi Data*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Winata, F. (2014). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*, 4(1).
- Wiratna, S. V. (2016). *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

## **CURRICULUM VIATE**



Nama : Sisra Febryanti

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/ Tanggal Lahir : Kijang/ 13 Februari 1996

Agama : Islam

Alamat : JL. Kp. Lengkuas RT. 003 RW. 002 Kijang kota  
Bintan Timur

Riwayat Pendidikan : SD Negeri 017 Bintan Timur  
SMP Negeri 1 Bintan  
SMA Negeri 1 Bintan  
STIE Pembangunan Tanjungpinang